

Volume 1 Nomor 2 Desember 2021

P-ISSN 2797-9008
E-ISSN 2807-4262



JUASPOL

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

*Progam Studi Magister Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Volume: 1/Nomor 2/Desember 2021

P-ISSN 2797-9008

E-ISSN 2807-4262

- PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA
(Darsono)
- PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN
(Mangihut Siregar/M. Arifin/Darsono)
- DESKRIPSI POLA SOSIALISASI DALAM KELUARGA YANG BEKERJA (Studi Kasus di Kec. Taman Kab. Sidoarjo)
(Yudi Harianto CU.)
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: Studi Kasus Komite SMAN dan SMKS Kota Surabaya
(Kunjung Wahyudi/Basa Alim Tualeka/Sugeng Pujileksono)
- MENGANALISA FAKTOR MANUSIA DALAM PERUBAHAN MANAJEMEN BAGI ANAK-ANAK YANG DITEMPATKAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN SPONSOR
(Rodney Westerlaken)

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

JURNAL ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disingkat dengan Juispol merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan secara periodik (dua kali dalam setahun) yang dikelola oleh Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jurnal Juispol bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti, mengkritisi dan mencari solusi akan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian bukan hanya sekedar memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi jenjang S1, S2, dan S3, tetapi dapat berfungsi untuk masyarakat umum terlebih kepada pengambil kebijakan.

Kami sangat mengharapkan hasil penelitian atau hasil *review* dari bapak/ibu sesuai dengan *template* Juispol. Syarat untuk mengirimkan hasil laporan penelitian ke Juispol sangat mudah, kirimkan sesuai dengan format yang dimiliki Juispol ke email: juispol@uwks.ac.id. Kami menunggu karya-karya hebat saudara untuk membangun dunia akademik serta mengetahui dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupan kita. Selamat berkarya.

Pemimpin redaksi : Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

Editor : 1. Prof. Dr. Ali Achsan Mustafa, Drs.
2. Dr. Darsono, Drs., M.Si.
3. Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si.
4. Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.
5. Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M.
6. Dr. Frederik Fernandez, Drs., M.Pd.
7. Warjio, Ph.D.
8. Dr. Yenik Pujowati, S.AP., M.AP.
9. Dian Kristyanto, S.IIP., M.IP.

Editor : 1. Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D.
2. Prof. Dr. Agus Sukritiyanto
3. Prof. Dr. Arif Darmawan, M.Si.
4. Dr. Mohammad Suud, M.A.
5. Dr. Rodney Westerlaken, MA., BED.

Bendahara : Endah

Administrasi : Munari, Eko

Alamat redaksi:

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya

Email: juispolmipuwks@gmail.com

HP./W.A.: 081331878434

Daftar Isi

PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA (Darsono)	61
PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN (Mangihut Siregar, M. Arifin, Darsono)	75
DESKRIPSI POLA SOSIALISASI DALAM KELUARGA YANG BEKERJA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO) (Yudi Harianto CU.)	87
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA (Kunjung Wahyudi, Basa Alim Tualeka, Sugeng Pujileksono)	109
MENGANALISA FAKTOR MANUSIA DALAM PERUBAHAN MANAJEMEN BAGI ANAK-ANAK YANG DITEMPATKAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN SPONSOR (Rodney Westerlaken)	126
PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	136

PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA

Oleh:

Darsono

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: darsono_fbs@uwks.ac.id

Abstrak

Sebagai *multination-state*, Indonesia dipersatukan oleh semangat dan tekad untuk bersama dan bersatu, bukan kesamaan dan kesatuan etnis. Munculnya nasionalisme etnis (*ethnonation*) yang dipicu menguatnya identitas etnis di berbagai negara menjadi pelajaran penting untuk menjaga keindonesiaan di tengah era kapitalisme baru yang cenderung imperial-global. Di tengah pola interaksi etnis yang segmentatif dan sebagian stratifikatif, penguasaan sumber daya menjadi instrumen yang sangat penting, apakah itu tuntutan penguasaan sumber daya (alam) oleh kelompok etnis, tuntutan otonomi, otonomi khusus, otonomi khusus plus, sampai pada tuntutan kemerdekaan etnis. Penetrasi kapital di daerah tertentu yang tidak mampu dikendalikan negara akan menjadi pemicu kuat berkembangnya nasionalisme etnis, tidak hanya karena timbulnya perasaan tidak dilibatkannya penduduk asli, isu marginalisasi dan ketidakadilan, hingga penindasan dan penjajahan, tetapi realitanya memang masyarakat asli tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan karena kalah dalam kompetisi memperebutkan akses-akses penting.

Kata kunci: kapitalisme, nasionalisme etnis, politik etnis, identitas etnis, sumber daya

Abstract

As a multination-state, Indonesia is united by the spirit and determination to be together and united, neither similarity nor ethnic unity. The emergence of ethnic nationalism (ethnonation) which is triggered by the strengthening of ethnic identities in various countries is an important lesson to maintain Indonesianness in the midst of a new era of capitalism that tends to be imperial-global. In the midst of a segmentative and partly stratified pattern of ethnic interaction, resource control becomes a very important instrument, whether it is a demand for control of (natural) resources by ethnic groups, the demands for autonomy, special autonomy, special autonomy plus, to the demands for ethnic independence. The penetration of capital in certain areas that are not able to be controlled by the state will be a strong trigger for the development of ethnic nationalism, not only because of the feeling of being excluded from the indigenous population, issues of marginalization and injustice, to oppression and colonization, but the reality is that indigenous people still live in poverty and backwardness because lost in the competition for essential accesses.

Keywords: capitalism, ethnic nationalism, ethnic politics, ethnic identity, resources

A. Pendahuluan

Sebagai bangsa yang bukan didasarkan pada kesatuan etnis, yang mempersatukan Indonesia sebagai satu bangsa dan sekaligus negara bukanlah sesuatu yang alamiah. Indonesia “hanya” dipersatukan oleh semangat dan tekad untuk bersama dan bersatu, “tidak kurang, tidak lebih” (Suseno, 1998). Tekad itu tumbuh dalam sejarah panjang pengalaman bersama yang sebagian merupakan sejarah penderitaan dan penindasan akibat kolonialisme yang kemudian melahirkan pengalaman perjuangan bersama demi kemerdekaan. Bila semangat dan tekad untuk bersama itu tidak dirasakan lagi, menguap, atau bahkan hilang sama sekali, maka yang tinggal adalah kelompok-kelompok kecil etnis yang berbeda bahasa, suku, agama, kedaerahan, dan bersifat homogen ke dalam serta eksklusif ke luar. Bila demikian, maka kebangsaan Indonesia menjadi kosong dan nasionalisme akan digantikan oleh primordialisme.

Persoalan kebangsaan yang disampaikan Franz Magnis-Suseno lebih dari dua dasawarsa yang lalu itu kembali menemukan esensi pentingnya ketika nasionalisme etnis (untuk tidak menyebutnya sebagai gerakan separatisme) mencuat. Kasus Papua yang saat ini menyita perhatian tidak hanya oleh Pemerintah, namun juga LSM, akademisi-peneliti, masyarakat awam, dan masyarakat internasional, menjadi fakta teraktual yang menunjukkan betapa sendi-sendi kebangsaan Indonesia bisa merapuh ketika semangat dan tekad untuk bersama dalam kerangka Indonesia sedang melemah. Bahkan, di kalangan para pemuda (baca: mahasiswa) Papua, etnonasionalisme ini menjadi isu penting (Darsono, 2015) dalam konteks tuntutan kemerdekaan Papua. Demikian juga masalah Aceh yang saat ini relatif dianggap selesai pasca-Otonomi Khusus sebagai bagian dari Perjanjian Helsinki, masih menyimpan potensi bangkitnya nasionalisme etnis yang sewaktu-waktu bisa menjadi aktual.

Lebih dari itu, pada kasus para mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam berbagai organisasi mahasiswa atau organisasi pemuda yang berbasis etnis-primordial, terjadi kontestasi, bukan hanya nasionalisme ganda, melainkan multi-loyalitas yang disebut multi-nasionalisme atau banyak nasionalisme (Darsono, 2021). Menurut penelitian tersebut, pada diri mahasiswa ini terdapat banyak loyalitas, misalnya loyalitas terhadap ikatan primordial seperti asal-usul daerah dengan kultur khas daerahnya, loyalitas terhadap agama dan religi yang bisa melahirkan redikalisme, dan loyalitas pada negara sebagai *nation-state* yang lebih luas. Terlebih ketika etnonasionalisme ini berkelindan dengan kapitalisme, baik dalam konteks pembangunan (*development*) maupun konteks lain, yang disebut sebagai penetrasi kapital.

Kecenderungan bangkitnya nasionalisme etnis yang berkaitan dengan pembangunan dan penetrasi kapital ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia yang lain. Tulisan Hintzen (1985) *Etnicity, Class, and International Capitalis Penetration in Guyana and Trinidad*, menjelaskan dengan baik relasi antara etnisitas, klas, dan penetrasi kapital internasional; sekaligus menjadi perdebatan atas paper Enloe (1969) yang menjelaskan bagaimana penetrasi kapitalis internasional dalam bentuk agro-kapitalis multinasional di Malaysia memberikan efek yang kuat terhadap struktur rekasi inter-etnik melalui relasi timbal balik partikular dengan negara. Setidaknya, kapital internasional dapat mendorong perubahan dan dukungan yang kuat terhadap interaksi rasial dan etnis. Kemerdekaan Kosovo yang semula merupakan sebuah provinsi di Serbia dan didiami etnis Albania yang mayoritas Islam juga menjadi penegas bahwa persoalan etnis dan nasionalisme etnis ini tidak pernah berhenti, apalagi padam atau hilang. Ibarat bara dalam sekam, api itu terus menyala meski kadang tidak tampak atau sengaja tidak ditampakkan dari luar dan akan menyengat ketika ada *driving force*

yang kuat, terutama dalam hal penetrasi kapital (internasional).

B. Nasionalisme Etnis vs Nasionalisme Negara

Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara-negara yang memiliki kemajemukan etnis sehingga disebut sebagai *multination-state*. Wilayah geografis yang luasnya daratannya hampir dua juta kilometer persegi (1.919.407 km², BPS, 2018) dengan sekitar 17.504 pulau besar dan kecil dan masing-masing dikelilingi laut menjadikan Indonesia kaya akan komunitas etnis yang oleh Koentjaraningrat (1993:1) disebut sebagai diversitas sukubangsa. Komunitas-komunitas etnis ini terbangun berdasarkan organisasi sosial yang keanggotaannya didasarkan pada kesamaan asal-sejarah atau adanya kesamaan ras, budaya, agama, atau bahasa.

Menurut Esman (dalam Kuper & Kuper, 2000:308), lebih dari 80%, bahkan lebih dari 90% (Osawa, 1997) negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan *multination-state* yang berarti memiliki penduduk yang terdiri atas dua atau lebih etnis yang berbeda. Pola hubungan di antara komunitas etnis itu juga bervariasi, terentang dari hubungan yang berpola **stratifikatif**, yaitu salah satu kelompok mendominasi kelompok-kelompok lain secara politik dan ekonomi, sampai yang berpola **segmentatif**, di mana tiap kelompok menguasai sumber atau institusi sendiri.

Dalam konteks pola hubungan tersebut, di antara kelompok-kelompok etnis itu sering harus berinteraksi, juga berhadapan. Proses interaksi, termasuk persaingan antaretnis ini bisa berjalan dengan cara kemasyarakatan yang damai, namun tidak jarang melalui jalan kekerasan. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka **menguasai** (dalam arti mengendalikan aparat-aparat negara), **meraih otonomi** (pemerintahan daerah), dan tidak jarang pula terjadi **tuntutan kemerdekaan**, ter-

lepas dan terpisah dari negara, apabila tuntutan-tuntutan etnis tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, lebih dari 50% dari negara-negara yang *multination-state* tersebut memiliki satu atau lebih kelompok etnis yang bermasalah, yaitu kelompok-kelompok etnis yang memiliki aspirasi nasionalisme.

Dengan interaksi yang demikian, solidaritas etnis menjadi faktor penting dalam politik identitas etnis. Komunitas etnis mengidentifikasi simbol-simbol etnis (ras, sejarah, budaya, agama, bahasa) untuk menumbuhkan kesadaran etnis, pembentukan dan pengabdian batas-batas etnis, dan arti penting identitas etnis bagi kelompok etnis yang bersangkutan. Inilah yang dimaksudkan dengan solidaritas etnis.

Bila politik etnis negara tidak sejalan dengan politik identitas etnis, solidaritas etnis menjadi instrumen penting, terutama ketika terjadi penentuan nasib sendiri. Solidaritas etnis bisa menjadi nasionalisme etnis ketika berhadapan dengan nasionalisme (ke-)negara(-an) yang lebih luas. Ketika politik negara tak lagi sejalan dengan kesadaran etnis, maka bangkitnya nasionalisme etnis adalah keniscayaan.

Yang dimaksudkan dengan nasionalisme etnis ialah sentimen (dan semangat) dari anggota-anggota bangsa/kelompok etnis (*ethnonation*) yang dimobilisasi untuk mem-perjuangkan kedaulatan bagi komunitas etnis mereka. Bangsa/kelompok etnis (*ethnonation*) yang dimaksudkan dalam pengertian tersebut ialah komunitas orang yang memaknakan identitas politik mereka berdasarkan kesamaan ciri etnis (primordialisme) dengan mengklaim hak untuk menjalankan kedaulatan sendiri. Nasionalisme etnis merupakan usaha untuk memperoleh hak *self-determination*, memperoleh kedaulatan, dan meraih kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang berdaulat.

Nasionalisme etnis merupakan salah satu bentuk nasionalisme, di samping bentuk-bentuk nasionalisme yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam *Wikipedia Indonesia*, bentuk-bentuk nasionalisme ini meliputi: nasionalisme sipil/kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, dan nasionalisme agama.

Sebagai entitas sosial dan sekaligus identitas sosial sebagai bangsa (*nation*), nasionalisme itu bisa merupakan sesuatu yang nyata ada (*real*), namun bisa juga menjadi sesuatu yang memang dikonstruksikan atau diadakan (*constructed*). Hal ini melahirkan paradigma (sudut pandang) yang berbeda tentang nasionalisme. Sedikitnya terdapat tiga perspektif dalam memandang nasionalisme sebagaimana dikemukakan oleh James D. Kellas (1998), yaitu (1) nasionalisme primordial, (2) nasionalisme kontekstual, dan (3) nasionalisme konstruktif. Gerard Delanty (2001) membuat kategori nasionalisme ini atas tiga paradigma berikut: (a) paradigma esensialis (*essentialist*)/primordialis (*primordialist*), (b) paradigma konstruktivis (*constructivist*), dan (c) *imaginary discourse* (Delanty, 2001). Delanty memunculkan paradigma gabungan yang mengadopsi dua paradigma yang awal tersebut.

Paradigma esensialis/nasionalisme primordial memandang nasionalisme sebagai *authentic culture traditional* (tradisi budaya yang otentik) (Delanty, 2001) dan berkembang melalui proses yang disebut *self-contained cultural process* (Kellas, 1998) sehingga eksistensi etnik dengan sejarah kebudayaannya menjamin eksistensi nasionalisme. Menurut paradigma ini, (a) suatu bangsa (*nation*) didasarkan pada esensi primordial, (b) tradisi budaya yang otentik itu bisa dijelaskan oleh sejarah, dan (c) kekuatan tradisi bangsa adalah sebuah wacana yang berkembang sepanjang sejarah tradisi bangsa itu (Delanty, 2001). Dengan demikian, nasionalisme bersifat kontinu, terus berlangsung sepanjang sejarah. Dalam perspektif ini, akar nasionalisme

adalah elemen-elemen yang membentuk bangsa, yaitu elemen *tangible* (yaitu identitas, seperti bahasa, agama, teritorial) dan elemen *intangible* (bersifat psikologis, berupa ikatan emosional yang terbentuk dari pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai bersama) (Kellas, 1998 dalam Tambunan, 2004: 4).

Paradigma kontekstual memandang nasionalisme sebagai fenomena modern, produk dari konteks sosial dan sejarah modern (Smith, 1996 dalam Delanty, 2001; Tambunan, 2004). Nasionalisme tumbuh dan berkembang karena kelompok etnis menghadapi ketidakadilan; politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidakadilan ini bisa berupa pengabaian, eksploitasi, dominasi, kolonisasi, represi, diskriminasi, dan aneksasi. Dalam paradigma ini, terdapat tiga teori yang lazim digunakan, yaitu (1) teori *revised modernization*, yang melihat bentuk sistem politik, industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan sebagai faktor yang mendorong sentimen kebangsaan; (2) kolonisasi internal, yang menunjuk hubungan entitas dan ketimpangan ekonomi sebagai faktor yang mendorong tumbuhnya nasionalisme etnis; dan (3) *relative deprivation*, sebagai diskrepansi yang dipersepsikan berlangsung antara harapan tentang nilai dan kapabilitas untuk memperoleh nilai yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ketidakpuasan.

Persepektif konstruktif, sebagai paradigma ketiga, melihat bahwa nasionalisme tidak terbentuk begitu saja (karena primordial maupun adanya ketidakadilan secara kontekstual), tetapi melalui rekayasa sosial, kreasi strategis elit dengan memanfaatkan warisan primordial dan *setting* sosial, politik, budaya kontekstual yang sedang mereka hadapi. Dalam pandangan ini, ada dua komponen penting yang terlibat, yaitu pemimpin/kepemimpinan dan organisasi yang menggunakan nasionalisme untuk memobilisasi massa. Karena nasionalisme itu dikonstruksi oleh aktor sosial, maka nasionalisme itu tidak bisa dijelaskan melalui referensi sejarah. Suatu bangsa adalah

sebuah diskursus/wacana naratif yang selalu terbuka untuk diformulasikan sesuai dengan tujuannya. Inilah yang oleh Gerard Delanty (2001) digunakan sebagai jalan tengah, nasionalisme sebagai sebuah diskursus yang bersifat relatif; bisa mencakup dua dimensi sekaligus, nyata (*real*) dan sekaligus dikonstruksikan (*constructed*).

Menurut Benedict Anderson (1983/2001), suatu bangsa bisa dilihat sebagai wacana-wacana terbayangkan (*imaginary discourses*). Suatu komunitas bisa dibedakan dari komunitas lain, bukan karena keunikan atau keaslian (asal-usul)-nya, tetapi oleh cara mereka mengimajinasikan diri dan komunitas mereka. "*The allow individuals to imagined the territory of the nation without having personally to encounter it and its inhabitants.*" Dengan demikian, nasionalisme dipandang sebagai salah satu kognisi dan makna budaya.

Bagaimana kondisi Indonesia?

Meskipun memiliki akar sejarah yang panjang, nasionalisme Indonesia sebagai hasil penciptaan simbol adalah sesuatu yang relatif baru, sekitar awal abad kedua puluh. Jika merujuk ke organisasi nasional pertama, maka Boedi Oetomo (1908) adalah yang tercatat dalam buku sejarah. Peristiwa Sumpah Pemuda yang diklaim sebagai salah satu hasil penciptaan simbol nasionalisme (Foulcher, 2000) diikrarkan tahun 1928; sebuah kurun waktu yang relatif sangat baru dibandingkan dengan berbagai kelompok etnis yang sejak lama ada. Sumpah Pemuda yang mengakui "satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa: Indonesia" itu pun lahir dari kompromi berbagai perkumpulan (etnis) yang didesak kebutuhan untuk bersatu.

Kebutuhan dan semangat untuk bersatu itu mengalahkan asal-usul keetnisan mereka, melupakan perbedaan dan keragaman, dan membayangkan kebesaran nasionalisme Indonesia. Inilah yang oleh Benedict Anderson (1983/2001) disebut sebagai *imagined community*, suatu bangsa yang dilihat sebagai wacana-wacana terbayangkan (*imaginary discourses*). Dalam perspektif ini,

suatu komunitas bisa dibedakan dari komunitas lain, bukan karena keunikan atau keaslian (asal-usul)-nya, tetapi oleh cara mereka mengimajinasikan diri dan komunitas mereka itu.

Sebagai simbol yang diciptakan, nasionalisme Indonesia berkaitan dengan kognisi dan makna budaya yang akan terus berubah sesuai perkembangan zaman. Artinya, sebagai semangat dan tekad bersama dari berbagai kelompok etnis, makna simbol nasionalisme itu bisa memudar, berubah, atau berbeda sama sekali dari maksud awalnya. Dengan kata lain, semangat dan tekad kebersamaan dan kebersatuan dengan nama Indonesia itu bisa menguat tatkala kepentingan-kepentingan etnis terakomodasi dengan baik; namun, bisa juga melemah dan turun sampai pada titik nadir bila terjadi yang sebaliknya. Ketika simbol nasionalisme Indonesia dipandang tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, maka akan diciptakan simbol-simbol baru yang lebih relevan.

Timor Timur yang melepaskan diri dari Indonesia dan sekarang menjadi Republik Demokratik Timor Leste menjadi salah satu contoh kuat dalam hal ini. Demikian juga dengan tetap eksisnya gerakan nasionalisme etnis (sekali lagi, untuk tidak menyebut sebagai gerakan separatisme) di berbagai wilayah, sebut saja di Papua dengan Organisasi Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan Papua Barat atau Mediterania Barat, di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka meski sudah mereda sejak Otonomi khusus namun esensi kemerdekaan masih dirasakan, di Maluku (Republik Maluku Selatan), dan belakangan di Kepulauan Riau. Meski untuk Nagroe Aceh Darussalam bisa diselesaikan dengan Perjanjian Helsinki, menurut hemat saya, hal itu hanya bersifat sementara. Mengapa demikian? Nasionalisme etnis tak akan pernah padam. Buktinya, kata-kata "Merdeka" masih melekat dalam setiap gerak politik mereka.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa nasionalisme etnis itu bangkit

dan harus berhadapan dengan nasionalisme negara?

Meski jawaban atas pertanyaan tersebut kompleks, secara esensial tampaknya ada kekeliruan paradigma dalam melihat keetnisan di Indonesia. Keragaman etnis lebih dipandang sebagai masalah dan bencana daripada sebagai anugerah dan kekayaan. Karena dilihat sebagai masalah, keetnisan ditekan secara represif sedemikian rupa sehingga tidak muncul ke permukaan. Komunitas-komunitas etnis tidak diberi hak dan kebebasan untuk mengembangkan kekhasan (sosial-budaya) mereka. Yang justru dikembangkan oleh negara ialah keseragaman budaya; maka sedikit saja ada aktivitas sosial atau politik yang bernuansa etnis, negara langsung memberikan stigma sebagai gerakan separatis, ancaman kesatuan dan persatuan, atau nama yang lebih seram, bahaya laten komunis.

Dengan kata lain, sistem politik etnis yang dikembangkan negara tidak cukup mewadahi kepentingan-kepentingan etnis. Sistem politik sentralistik yang dipadu dengan otoritarianisme, tentu dengan eufimisme demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak sesuai dengan politik identitas etnis. Kelompok-kelompok etnis merasa tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat, lalu mengembangkan solidaritas etnis. Pemekaran wilayah yang terjadi akhir-akhir ini, baik untuk level provinsi maupun kabupaten, tampaknya lebih didasarkan pada identitas etnis, di samping faktor kepentingan elite lokal.

C. Penetrasi Kapital

Kapitalisme yang berkembang sejak pasca-Revolusi Industri terus memperkuat diri hingga akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini dan tampaknya masih akan terus mendominasi perekonomian dunia di masa mendatang. Revolusi industri yang mendorong perkembangan teknologi secara luar biasa cepat berimplikasi pada proses industrialisasi yang juga berkembang amat pesat. Bila semula industri-industri dasar,

seperti industri logam, alat-alat mesin, pertambangan, dan yang sejenis yang menjadi sasaran kapitalisme (sampai abad XIX), maka pada masa berikutnya industri-industri penting dan berteknologi tinggi, seperti industri mobil, listrik, penerbangan, elektronik dan teknologi-teknologi yang memanfaatkan nuklir dan komputer yang sangat canggih adalah ciri kapitalisme abad XX (Lenski, 1970 dalam Sanderson, 1993:195–197) di samping tetap menguasai industri-industri dasar. Dengan kata lain, teknologi dan industrialisasi sebagai produk historis ekonomi dunia kapitalis semakin memantapkan posisi ekonomi kapitalis, yaitu negara-negara (atau bangsa-bangsa) yang ekonominya sangat kuat.

Kapitalisme yang mampu melampaui batas-batas teritorial negara sehingga bersifat global menjadikan kapitalisme global sebagai kekuatan dahsyat, tidak hanya di sektor ekonomi (substruktur/*base*), tetapi juga politik, sosial, budaya, dan ideologi (superstruktur). Batas-batas teritori negara menjadi tidak penting, sehingga oleh Kenichi Ohmae (1995) disebut sebagai *the end of the nation state and the rise of regional economies*. Menurut Ohmae terdapat empat hal penting yang menandai berakhirnya era negara secara teritori dan menguatnya ekonomi regional (dan global), yaitu *investment* (investasi), *industry* (industri), *information technology* (teknologi informasi), dan *individual consumer* (selera individu).

Kekuatan kapitalis semakin tak terbendung ketika ciri persaingan di antara kapitalis berkurang secara signifikan dan cenderung drastis ketika mereka melakukan persekutuan dan pemusatan modal dengan label perusahaan/korporasi multinasional (*multinational corporation*). Termasuk di dalamnya kapitalisme yang dikuasai oleh negara/pemerintah (*sovereign wealth fund*). Mereka menggusur dan menjatuhkan produsen dan perusahaan-perusahaan kecil sehingga monopoli kapitalisme tak bisa dielakkan. Kapitalisme monopoli telah menggantikan kapitalisme kompetitif.

Kapitalisme dengan korporasi multinasionalnya memungkinkan masuknya investasi dalam jumlah besar ke suatu negara, terutama negara-negara pinggiran atau semi pinggiran yang biasanya masih bersifat *rural*. Dengan sumber daya alam melimpah yang siap dieksploitasi ditambah dengan potensi pasar yang besar dan tenaga kerja yang murah, negara-negara pinggiran dan semipinggiran ini menjadi pilihan yang paling menggiurkan dan sekaligus menguntungkan bagi kapitalis untuk mengakumulasi modal. Investasi dalam jumlah sangat besar akan mudah mengalir ke negara-negara tersebut.

Masuknya investasi kapital dalam jumlah/skala besar atau sangat besar dari negara-negara pusat atau semi-pusat ke negara-negara pinggiran atau semipinggiran inilah yang disebut sebagai penetrasi kapital. Negara-negara yang semula bersifat *rural* dengan pertanian sebagai komoditas utama dan tidak memiliki modal dan kemampuan (sumber daya manusianya terhadap) teknologi untuk mengolah potensi kekayaan alam yang dimiliki disentuh oleh negara pusat (maju) melalui investasi. Investasi ini bisa berbentuk, penanaman modal asing (PMA), pinjaman lunak jangka panjang, *grant*, hibah, atau bentuk investasi yang lain.

Investasi modal asing yang besar atau sangat besar ini lazimnya digunakan untuk membangun industri (industrialisasi) yang berskala besar dengan teknologi maju (dan mungkin sangat canggih). Industri dan teknologi yang dibangun dan dikembangkan adalah industri-industri yang ditentukan oleh negara-negara kapitalis maju dengan teknologi maju (dan canggih) untuk kepentingan negara-negara (atau bangsa) kapitalis, bukan industri yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal tempat investasi dilakukan. Sentuhan negara-negara pusat

yang maju ini, secara teoretis, diharapkan bisa membangkitkan negara-negara pinggiran untuk maju mengikuti negara pusat yang menjadi patronnya¹.

Industrialisasi berskala besar dengan teknologi maju dan canggih secara masif berkembang di Indonesia sejak Orde Baru membuka kran bagi kapitalisme. Semua sektor sumber daya alam, perkebunan, perhutanan, pertambangan, diserahkan kepada kapitalis (terutama asing) untuk dieksploitasi. Mulai Aceh sampai dengan Papua, dari Sabang sampai Merauke dengan segala spesifikasinya menjadi sasaran empuk para kapitalis dunia. Industri-industri tersebut ditentukan oleh kapitalis tanpa mempertimbangkan, apalagi memperhatikan, masyarakat lokal.

Industrialisasi membutuhkan tenaga kerja terampil (*skill*) yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Tenaga kerja terampil dari luar masuk dan kalau pun ada tenaga kerja lokal yang bisa masuk ke industri, itu terbatas pada tenaga-tenaga kasar yang tidak membutuhkan keterampilan (*unskill*). Dengan demikian, penetrasi kapital itu diikuti pula dengan masuknya banyak tenaga kerja (orang-orang) dari luar yang berbeda dengan orang-orang lokal.

Perbedaan pendatang baru dengan masyarakat lokal ini tidak hanya dalam hal keterampilan yang dimiliki, tetapi juga ciri-ciri fisiknya (ras) dan cara/pola sosial serta budayanya. Dibandingkan dengan komunitas lokal/penduduk asli, pendatang baru ini justru menguasai sumber-sumber ekonomi penting di wilayah industri baru ini.

¹ Teori Ekonomi Marx menyebutkan bahwa cara kerja Asiatik tidak akan membuat negara-negara Asia maju seperti negara-negara Eropa. Oleh karena itu, sentuhan Negara Eropa akan membangkitkan Negara Asia untuk maju seperti Eropa. Teori Ketergantungan mempertanyakan tesis ini karena ternyata negara-negara pinggiran yang disentuh kapitalisme negara pusat justru tetap terbelakang, tidak bisa maju, apalagi menyamai negara pusat (Budiman, 1996:45–49).

D. Bagaimana Nasionalisme Etnis Bangkit

Pertanyaannya kemudian ialah bagaimana nasionalisme etnis bisa muncul dan bangkit dalam sistem sosial industrial akibat dari penetrasi kapital? Dengan kata lain, benarkah bahwa masuknya kapital dalam jumlah besar ke wilayah tertentu yang bersifat rural pada kelompok masyarakat tertentu (etnis) justru memunculkan nasionalisme etnis komunitas yang bersangkutan?

Meskipun pendekatan materialisme Marx atau Neo-Marxian belakangan ini dianggap tidak relevan dan tidak mencukupi untuk menjelaskan persoalan tersebut, dibandingkan dengan teori-teori baru, sebut saja posmodernisme, postrukturalisme, atau poskolonialisme, tampaknya persoalan etnisitas di Indonesia masih membutuhkan penjelasan materialisme.

Penetrasi kapital dalam bentuk industrialisasi dan teknologi maju yang masuk ke berbagai wilayah Indonesia (misalnya Aceh, Kepri, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) melalui Negara/Pemerintah Pusat mengakibatkan berbagai perubahan di wilayah itu yang bersangkutan, di antaranya bisa diuraikan berikut.

Pertama, penetrasi kapital yang diikuti dengan masuknya banyak tenaga kerja terampil ke wilayah industri, mengubah, tidak hanya jumlah penduduk, tetapi juga komposisi penduduk. Pendatang baru yang membawa cara dan pola hidup yang baru, pola-pola interaksi, dan budaya yang baru ini justru lebih menguasai sumber-sumber ekonomi penting yang bersifat industrial. Bila pendatang baru dengan berbagai atribut yang melekat tersebut mau dan mampu mengintegrasikan diri ke dalam komunitas masyarakat lokal, maka integrasi sosial bisa tercipta dengan baik.

Persoalan muncul ketika pendatang baru ini justru membentuk kelompok-kelompok sendiri (yang mereka katakan lebih "beradab"), terpisah dari masyarakat

lokal. Komunitas lokal, yang secara ekonomis, sosial, dan budaya lebih terbelakang, menjadi merasa terasing di lingkungan mereka sendiri karena sumber-sumber ekonomi yang baru, yang semula mereka harapkan dapat mengubah kehidupan mereka, ternyata dikuasai oleh penduduk pendatang.

Kedua, perubahan distribusi sumber daya ekonomi tak bisa dielakkan. Komunitas lokal yang semula bersifat rural dengan sumber ekonomi pertanian (juga hutan) dan sebagian masyarakat lokal yang masuk ke industri sebagai pekerja kasar, bersaing dengan sumber daya ekonomi baru yang bersifat urban-industrial. Petani, perambah hutan, atau pekerja kasar di satu sisi dan para pekerja kelas menengah ke atas di industri di sisi yang lain, saling berkompetisi. Ketimpangan ekonomi menjadi suatu keniscayaan dalam sistem sosial yang demikian.

Ketiga, masuknya pendatang baru ke wilayah industri memerlukan pemukiman-pemukiman baru yang sesuai dengan cara hidup mereka yang berbeda dengan pemukiman komunitas lokal. Pemukiman-pemukiman baru yang dibangun adalah pemukiman khas urban-industrial. Dengan demikian, akses masyarakat lokal atas properti menjadi lebih/sangat sempit, bila tidak dikatakan tertutup sama sekali.

Keempat, perubahan sumber ekonomi dan pola hidup urban-industrial menuntut penyelenggaraan pendidikan modern yang sesuai dengan tuntutan industri. Kompetisi memperebutkan akses terhadap pendidikan modern ini ternyata juga dimenangkan oleh masyarakat pendatang. Akses masyarakat lokal terhadap pendidikan (tinggi) sangat kurang dan sempit.

Demikian juga akses terhadap teknologi. Masyarakat pendatang yang masuk ke pendidikan modern memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi. Pada akhirnya, pendidikan dan keahlian teknologi yang dimiliki oleh pendatang ini menjadi instrumen penting untuk memperebutkan akses

terhadap pekerjaan (lebih luas: ekonomi) dengan profesi tertentu. Dengan kata lain, kesempatan terhadap pekerjaan dan profesi bagi anggota komunitas lokal sangat kecil.

Berbagai perubahan tersebut meningkatkan pola kompetisi di antara anggota-anggota atau kelompok-kelompok masyarakat. Secara umum, terdapat dua kelompok besar yang saling berkompetisi, yaitu kelompok pendatang (yang berciri urban dan memiliki kemampuan ekonomi lebih baik serta akses ekonomis ke industri) dan kelompok/komunitas masyarakat lokal (berciri rural, terbelakang, dan tidak memiliki akses ekonomi ke industri). Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi yang tajam terjadi dalam kedua kelompok masyarakat tersebut.

Dalam kompetisi tersebut, masyarakat lokal yang tidak memiliki akses ekonomi (modal) dan tidak berpendidikan dan berkeahlian akan tersingkir; sedangkan masyarakat pendatang yang berciri urban yang terdidik dan punya profesi mampu bertahan. Masyarakat lokal yang merasa lebih berhak memiliki akses ekonomi, justru tersingkir dari kegiatan ekonomi kapitalis.

Yang mereka jumpai dan alami (setiap hari) justru adalah kerusakan lingkungan yang parah yang langsung berpengaruh pada kehidupan mereka. Komunitas lokal yang kalah ini mengalami **anomie**, **teralienasi** dari dirinya, orang lain, dan lingkungannya, sebagai akibat dari **depersonalisasi** dan **dehumanisasi**.

Kekalahan dalam kompetisi, anomie, dan alienasi yang dialami masyarakat lokal ini mengakibatkan mereka merasa tidak lagi menjadi bagian dari sistem yang ada. Sebagai gantinya, mereka melakukan identifikasi diri yang baru dengan mencari/merujuk simbol-simbol lain. Yang paling mudah ditemukan dan paling dekat dengan mereka serta telah menjadi bagian hidup mereka sejak lama adalah simbol-simbol etnisitas, primordialisme.

Melalui rekayasa sebagian orang yang lebih terdidik/elit sosial (Gramscian), simbol-simbol etnis ini dikembangkan. Selain untuk mendorong solidaritas etnis, rekayasa tersebut juga dimaksudkan untuk memobilisasi kekuatan massa. Massa yang telah mengidentifikasi dirinya dengan simbol-simbol etnis tersebut mendesak untuk dilakukan penentuan nasib sendiri, misalnya dengan otonomi (luas). Bila otonomi yang diinginkan oleh kelompok etnis tersebut tidak memuaskan, maka pilihannya adalah memisahkan diri dari negara dan memilih berkedaulatan sendiri.

Argumentasi tersebut memang tampak determinis. Ekonomi tampak menjadi determinan utama dalam proses munculnya nasionalisme etnis. Tanpa mengesampingkan terikutnya aspek-aspek lain dalam proses munculnya nasionalisme etnis tersebut, seperti sentralisasi dan otoritarianisme politik, alasan ekonomis memang yang paling mengedepan. Sebagaimana dikatakan Mayer, ekonomi memang bukan faktor yang menentukan, tetapi merupakan faktor primer (Ritzer, 2004). Oleh karena itu, dalam melihat kaitan antara penetrasi kapital dan munculnya nasionalisme etnis tersebut, ada beberapa penjelasan yang perlu ditambahkan sebagaimana yang terjadi pada etnis Kashmir di India dan Quebec di Kanada (Tambunan, 2004).

Pertama, beberapa elit yang merekayasa nasionalisme etnis itu memiliki relasi dengan tokoh-tokoh internasional. Lebih dari itu, sebagian dari elit tinggal dan hidup di luar negeri. Dengan demikian, akses internasional ikut mengambil bagian/peran dalam munculnya nasionalisme etnis.

Kedua, dalam kaitannya dengan relasi elit dan dunia internasional itu: (a) dukungan pemerintah luar negeri atau kelompok-kelompok di luar negeri yang memiliki afinitas hubungan etnis, baik yang bersifat historis maupun religius menjadi penting, (b) simpati dari organisasi-organisasi internasional pembela hak asasi manusia (HAM)

juga menjadi faktor penting dalam kebangkitan nasionalisme etnis, (c) publikasi media internasional (*media coverage*) juga menjadi hal penting, dan (d) dukungan-dukungan negara besar, yang memiliki agenda politik (dan ekonomi) tertentu juga menjadi faktor yang berpengaruh.

E. Penutup

Dalam menganalisis munculnya nasionalisme etnis, penetrasi kapital tentu bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Sangat mungkin ada dan hadirnya faktor lain dalam proses kemunculan nasionalisme etnis itu, baik yang terjadi di Papua (Organisasi Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan Papua Barat atau Mediterania Barat), di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka) yang masih terasa, di Maluku (Republik Maluku Selatan) pada masa lalu, dan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Untuk memastikan faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya nasionalisme etnis di sejumlah daerah tersebut, diperlukan penelitian empiris yang lebih mendalam.

Sebagai penutup, dengan asumsi bahwa nasionalisme etnis tak bisa dihentikan, dipadamkan, apalagi dibasmi, maka kebijakan negara (politik etnis) terhadap etnisitas perlu segera diubah. Etnisitas harus dipandang sebagai anugerah dan kekayaan yang harus dikelola dan dikembangkan sehingga tidak hanya berpotensi mendatangkan keuntungan, tetapi secara konkret dan aktual memang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus. 1993. "Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam: Penggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia". Makalah untuk *Seminar tentang Nasionalisme Indonesia Menjelang Abad XXI* di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2–5 Juni. [Http://www.rz.berlin.mpg.de/~wm/PAP/GJA-bin-kejora.html](http://www.rz.berlin.mpg.de/~wm/PAP/GJA-bin-kejora.html). Diakses pada 22 September 2009.
- Agger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Allcoff, Linda Martin dan Eduardo Mendieta ed. 2003. *Identities: Race, Class, Gender, and Nationality*. UK: Blackwell Pub.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSIST Press.
- Antonio, Robert J. 1990. "The Decline of the Grand Narrative of Emancipatory Modernity: Crisis or Renewal in Neo-Marxian Theory?". Dalam George Ritzer (ed.) *Frontiers of Social Theory: The New Syntheses*. New York: Columbia University Press.
- Beilharz, Peter and Trevor Hogan. (ed.). 2002. *Social Self, Global Culture: An Introduction to Sociological Ideas*. 2nd Ed. New York: Oxford University Press.
- Berezin, Mabel. 2006. "Xenophobia and The New Nationalism". Dalam Gerard Delanty dan Krishan Kumar (ed.). *The SAGE Handbook of Nation and Nationalism*.
- Berger, Peter L. dan Hansfried Kellner. 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali*. Terj. Herri Joediono. Jakarta: LP3ES.
- Billig, Michael. 1995. *Banal Nationalism*. London: Sage Publications.

- Boucher, Geoff. 2000. "Toward Ethical Life: Tarrying with the Negative as Radicalization of Postmarxism". *Seminar, Hegel-Marx-Derrida*. Melbourne, 19 Februari.
- Bouwman, Paul. 2006. "Marxism(s) and Post-Marxism(s)". [Http://rime.teel.ac.uk/VLE/DATA/CSEARCH/CS/2006/03/0189](http://rime.teel.ac.uk/VLE/DATA/CSEARCH/CS/2006/03/0189). Diakses 3 September 2009.
- Brown, David. 2006. "Contending Nationalism in South-East Asia". Dalam Gerard Delanty dan Krishan Kumar (ed.). *The SAGE Handbook of Nation and Nationalism*.
- Brubaker, R. 1996. *Nationalism Reframed*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Calhoun, C. 1997. *Nationalism*. Buckingham: Open University Press.
- Castells, M. 1997. *The Power of Identity*. Oxford: Blackwell.
- Connor, Walker. 1978. "A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a ...". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Darsono. 2015. "Construction of Nationalism on Papuan College Student in Surabaya Indonesia in Multiculturalism Perspective". Dalam *American International Journal of Social Science*. Volume 4, Nomor 4, Agustus.
- Darsono. 2021. "Multiloyalty and New Nationalism in Indonesian Young Generation who Join Ethnic-Primordial Student Association". Dalam *iJournals: International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC)*. Volume 9, Issue 2, Februari.
- Dhakidae, Daniel. 2001. "Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-Komunitas Terbayang". Dalam Benedict Anderson. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSIST Press.
- Delanty, Gerard. 2001. "Nationalism: Between Nation and State". Dalam Ritzer, George dan Barry Smart, *Handbook of Social Theory*. London: SAGE Publ.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. ed. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. Second edition. London: Sage Publications, Inc.
- Deustch, Karl W. 1966. "Nationalism and Social Communication". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Elson, Robert Edward. 2009. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Terj. Zia Anshor. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Farid, Hilmar. 1996. "Menemukan Bangsa, Mencipta Bahasa: Bahasa, Politik, dan Nasionalisme Indonesia". Dalam Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Feagin, Joe R. dan Clairece Booher Feagin. 1996. *Racial and Ethnic Reation*. Fifth ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Fearon, James D., Kimuli Kasara, dan David D. Laitin. 2007. "Ethnic Minority Rule and Civil War Onset". Dalam *The American Political Sciences Review*. Vol. 101, No. 1, Februari.
- Flynn, M.K. 2002. "Nationalism: Theory and its Discontents". Dalam *The Global Review of Ethnopolitics*. Vol. 1, No. 3, March 2002, hal. 67–75.
- Geertz, Clifford. 1963. "Primordial and Civic Ties". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Gellner, Ernest. 1964. "Nationalism and Modernization". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nation and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell.

- Gellner, Ernest. 1997. *Encounters with Nationalism*. Oxford: Blackwell.
- Giddens, Anthony. 1985. "The Nation as Power-Container". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Gorski, Philip S. 2000. "The Mosaik Moment: An Early Modernist Critique of Modernist Theories of Nationalism". Dalam *American Journal of Sociology*, Volume 105, Number 5, March.
- Hadi, Syamsul, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca-Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIREs FSIP UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Hamilton, Mark. 2007. "Engines of Change: The Role of Youth in Global Conflict and Development". Abstract. Paper Presented at The Annual Meeting of The International Studies Association 48th Annual Convention. Hilton Chicago, 28 Februari. http://www.allacademic.com/meta/p180553_index.html. Diakses pada 29 Juni 2009.
- Hamilton, Mark. 2007. "The Young and The Restless: Examining Incentives for Youth Participation in Global Conflict and Development". Abstract. Paper Presented at The Annual Meeting of The American Political Science Association. Hyatt Regency Chicago and The Sheraton Chicago Hotel and Tower, 30 Agustus 2007. http://www.allacademic.com/meta/p210704_index.html. Diakses pada 29 Juni 2009.
- Heffner, Robert W. ed. 2007. *Politik Multikulturalisme*. Terj. Bernardus Hidayat. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayah, Zulyani. 1996. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hintzen, Percy C. 1985. "Ethnicity, Class, and International Capitalist Penetration in Guyana and Trinidad". Dalam *Social and Economic Studies*. Volume 34, Nomor 3.
- Hobsbawm, E.J. 1992. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Horsman, Mathew & Andrew Marshall. 1995. *After the Nation-State: Citizens, Tribalism, and New World Disorder*. London: HarperCollinsPublishers.
- Hutchinson, John. 1994. *Modern Nationalism*. London: Fontana.
- Hutchinson, John & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Idriss, Cynthia. 2003. "A New Cultural Formation of National Belonging in Germany". Paper Presented at *The Annual Meeting of The American Sociological Association*. Atlanta Hilton Hotel, August 16. http://www.allacademic.com/meta/p107880_index.html. Diakses pada 29 Juni 2009.
- Kedourie, E. 1993. *Nationalism*. 4th.ed. London: Hutchinson.
- Kellas, James D. 1998. *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. London: MacMillan Publishihng Ltd.
- Kenny, Michael. 2004. *The Politics of Identity*. UK: Polity Press.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Kohn, Hans. 1944. *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Edisi ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right*. Oxford: Clarendon.
- Lincoln, Y., & Denzin, Norman, K. 2000. *Hanbook of Qualitaive Research* (Second Edition). London, New Delhi: SAGE Publications, Inc.
- Lemert, Charles. 2001. "Multiculturalism". Dalam Goerge Ritzer dan Barry

- Smart.(Ed.). *Handbook of Social Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- Magnis-Suseno, Franz. 1998. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Frans. 2007. *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Minogue, Kenneth. 2000. "Nationalism". Dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Edisi ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*. Jilid I dan II. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Nairn, Tom. 1977. "The Maladies of Development". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Nairn, Tom. 1997. *Faces of Nationalism: Japan Revisited*. Verso.
- Oommen, T.K. 2006. "Nation and Nationalism in South Asia". Dalam Gerard Delanty dan Krishan Kumar (ed.). *The SAGE Handbook of Nation and Nationalism*.
- Oommen, T.K. 2009. *Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas: Mendamaikan Persaingan Identitas*. Terj. Munabari Fahlesa. Bantul: Kreasi Wacana.
- Priyanto, Agus. 2003. "Kapitalisme Global dan Neokolonialisme". Dalam Tim (ed.) *Anak Bangsa Menggugat: Nasionalisme, Kemandirian, dan Kewirausahaan*. Jakarta: LP3ES.
- Renan, Ernest. 1882. "Qu'est-ce qu'une nation?" Terj. Ida Mae Snyder. Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Saito, Hiro. 2007. "The Deveopment of Cosmopolitan-National Identity: A Case of Japanese Youth". Abstract. Paper Presented at Annual Meeting of The International Society of Political Psychology. Classical Chinese Garden, Portland, Oregon, USA, 04 Juli 2007. http://www.allacademic.com/meta/p204673_index.html. Diakses pada 29 Juni 2009.
- Satria, Riri. 2003. "Nasionalisme sebagai Antitesis Globalisasi". Dalam Tim (ed.) *Anak Bangsa Menggugat: Nasionalisme, Kemandirian, dan Kewirausahaan*. Jakarta: LP3ES.
- Sedyawati, Edi. 2008. *Keindonesiaan dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Seton-Watson, Hugh. 1977. "Old and New Nations". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Setzler, Mark and Nick McRee. 2008. "Are Yong Mexican-Americans Resistant to Political Incorporation?". Paper Presented at *The Annual Meeting of The Midwest Political Science Association Annual National Conference*. The Palmer House Hilton, Chicago, 03 April 2008. http://www.allacademic.com/meta/p363455_index.html. Diakses pada 29 Juni 2009.
- Setzler, Mark and Nick McRee. 2009. "The Civic Engagement of Latino Youth". Paper Presented at *The Annual Meeting of The Midwest Political Science Association 67th Annual National Conference*. The Palmer House Hilton, Chicago, 02 April 2009. http://www.allacademic.com/meta/p363455_index.html. Diakses pada 29 Juni 2009.
- Singh, Bilveer. 2008. *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. New Jersey, New Brunswick: Transaction Publishers.

- Smith, Anthony. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell.
- Smith, Anthony. 1991. *National Identity*. Oxford: Penguin.
- Smith, Anthony. 1995. *Nations and Nationalism in the Global Era*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stalin, Joseph. 1973. "The Nation". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Tambunan, Edwin Martua Bangun. 2004. *Nasionalisme Etnik: Kashmir dan Quebec*. Semarang: Intra Pustaka Utama.
- Weber, Max. 1948. "The Nation". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Widjojo, Muridan S., dkk. 2009. *Papua Roadmap: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Obor Indonesia.